

Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap Penjaga Keamanan Rakyat di Lampung Utara Tahun 1945

Carlos Hendrawan^{1*}, Maskun², Suparman Arif³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: carloshendrawan7@gmail.com HP. +6282381562449

Received: August 12, 2019

Accepted: August 15, 2019

Online Published: August 16, 2019

Abstract: *Alamsyah Ratu Perwiranegara's contribution to the People's Security Guard in North Lampung in 1945. The problem of the research was what the contribution of Alamsyah Ratu Perwiranegara to the People's Security Guard (PKR) in Kotabumi in 1945 was. The research objective was to determine the contribution of Alamsyah Ratu Perwiranegara to the PKR in Kotabumi in the year 1945. The method used is the historical method. Based on research results Alamsyah Ratu Perwiranegara's contribution to the People's Security Guard in Kotabumi in 1945 was carried out during the formation of the PKR and after the formation of the PKR.*

Keywords: *alamsyah ratu perwiranegara, contribution, pkr*

Abstrak: **Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap Penjaga Keamanan Rakyat di Lampung Utara Tahun 1945.** Masalah pada penelitian yaitu apasajakah kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di Kotabumi pada tahun 1945. Tujuan penelitian untuk mengetahui kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap PKR di Kotabumi pada tahun 1945. Metode yang digunakan adalah metode historis. Berdasarkan hasil penelitian Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara terhadap Penjaga Keamanan Rakyat di Kotabumi Tahun 1945 dilakukan saat masa pembentukan PKR dan saat sesudah dibentuknya PKR.

Kata kunci: alamsyah ratu perwiranegara, kontribusi, pkr

PENDAHULUAN

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. “Pada saat itu di Lampung baru mengetahui adanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 oleh Mr. Abbas yang pada saat itu berada di Jakarta untuk menyelenggarakan pertemuan dan juga sebagai anggota dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) perwakilan dari Sumatera.

Namun Bangsa Indonesia harus kembali berjuang agar dapat mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih negaranya. Jalur perjuangan yang ditempuh adalah melalui diplomasi dan pengerahan kekuatan bersenjata atau Perang. Jalur perjuangan dengan perang menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari pada saat itu, namun bersamaan dengan itu jalur diplomasi tetap dilakukan.

Alamsyah Ratu Perwira saat menjelang tuntasnya masa penjajahan Jepang setelah Negeri Sakura itu menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 yang disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Tiga hari setelah Proklamasi, pasukan *Gyu-Gun* Pagaram dibubarkan dan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Alamsyah pun pulang ke Lampung. Namun, pimpinan militer kembali mengonsolidasikan kekuatan untuk melawan Jepang yang belum rela sepenuhnya meninggalkan Indonesia. Alamsyah kembali bertolak ke Sumatera Selatan (Lampung Post, 2008: 140).

Selama masa mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam menghadapi gangguan keamanan dan ancaman perang. Lebih lanjut bangsa

Indonesia bahkan mampu memukul mundur musuh, walaupun militer Indonesia masih sangat muda bahkan di awal belum terbentuk suatu organisasi tentara. Pemerintah Indonesia tidak berani ambil resiko, hingga yang terbentuk hanya suatu badan keamanan bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan Keamanan Rakyat lebih dikenal di Sumatera bagian Selatan dan sekitarnya dengan nama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR). PKR pada mulanya tak lebih dari tempat berkumpul opsir-opsir muda tanpa seragam, anak buah dan tanpa pangkat (Mestika Zed, 2005:126). Namun dalam perkembangannya BKR/PKR membuktikan dirinya lebih dari sekedar badan penjaga keamanan biasa.

Di Lampung juga terdapat suatu badan bernama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) yang didirikan pada September 1945 di Gedung Azad Hindh di Jalan R. Intan 23 Tanjungkarang (Dewan Harian Daerah, 1994:138). Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Lampung bermarkas pusat di Tanjungkarang. Namun kemudian Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) tersebar di berbagai ibukota kawedanan di Lampung.

Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Lampung merupakan suatu badan penjaga keamanan yang tugasnya menjaga keamanan seluruh wilayah Lampung. Orang-orang yang tergabung di dalamnya tentu merupakan orang-orang yang dipercaya cakap dan memiliki pengetahuan kemiliteran. Setelah kemerdekaan, orang-orang yang memiliki kemampuan kemiliteran tersebut adalah pemuda-pemuda Indonesia yang pernah mengikuti program pelatihan militer pada masa penjajahan seperti *Giyugun*, Mestika Zed mendefinisikan *Giyugun* sebagai Korps Tentara Sukarela (Mestika Zed, 2005:27).

Sebelum Indonesia merdeka tepatnya ketika pendudukan Jepang. Di Lampung pernah dibuka pendaftaran bagi para pemuda Lampung untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam *Giyugun*. Pengalaman yang didapat para opsir *Giyugun* Lampung berupa latihan-latihan Kemiliteran dari Jepang sangatlah berharga, mengingat sebelum pendudukan Jepang di Sumatera tidak dibentuk tentara militer KNIL (*Koninklijk Nederland-Indisch Leger*) seperti di Jawa.

Giyugun tidak dapat dimanfaatkan untuk membantu Jepang secara Langsung dalam Perang Asia Timur Raya, karena Jepang sudah terlebih dahulu mengalami kekalahan. Namun pelatihan yang diberikan Jepang tidak sia-sia karena opsir-opsir *Giyugun* Lampung mendapat ilmu kemiliteran yang nantinya bermanfaat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sumatera Selatan.

Maka pada tanggal 20 Agustus 1945 pasukan *Giyugun* di Pagaralam dibubarkan dan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Pada tanggal 22 Agustus 1945 Emir Moh. Nur memelopori pembentukan PKR di Lampung yaitu di Tanjung Karang, kemudian disusul pembentukan PKR di daerah-daerah yang dipelopori bekas perwira-perwira *Heiho* dan *Giyugun*. Di Lampung Utara Alamsyah bersama-sama dengan Riyakudu dan Muhyin membentuk PKR di Lampung Utara (Dewan Harian Daerah, 1994:25). Di Lampung Utara sendiri terdapat tiga kawedanan yang terdapat Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) yakni di Blambangan Umpu, Menggala dan Kotabumi (Suparwan G. Parikesit, 1995: 38).

Maka dari latar belakang masalah ini penulis bermaksud meneliti apa saja kontribusi Alamsyah Ratu

Perwiranegara terhadap Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di Kotabumi pada tahun 1945. Hal ini diharapkan agar masyarakat dan generasi muda Lampung tidak hanya mengetahui tentang Alamsyah Ratu Perwiranegara sebagai sosok pahlawan, tetapi juga dapat mengetahui kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam membentuk Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Diharapkan pula agar para generasi muda mampu meneladani sosok Alamsyah Ratu Perwiranegara yang mampu mengharumkan Lampung dengan segudang prestasinya dan menjadi generasi yang nasionalis dan mampu menghargai jasa para pahlawan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka peneliti memilih rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah "Apa saja kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap PKR di Kotabumi pada tahun 1945?"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta teknik analisis data deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penjaga Keamanan Rakyat (PKR)

PKR di wilayah Sumatera Selatan pada hakikatnya adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat) seperti di daerah Indonesia lainnya (Suparwan G. Parikesit, 1995:40). Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) merupakan suatu badan keamanan bentukan pemerintah yang pada waktu itu hanya dikenal di wilayah Sumatera khususnya di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Menurut Mestika Zed, BKR Sumatera Selatan

diberi nama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR). PKR pada mulanya tidak lebih dari sekedar tempat berkumpul opsir-opsir muda tanpa seragam, anak buah dan tanda pangkat (Mestika Zed, 2005:126). Pembentukan PKR itu meluas ke seluruh daerah di Lampung dan merupakan embrio organisasi militer di Lampung (Dewan Harian Daerah "45, 1994:138).

Awal kemerdekaan, para mantan perwira *Giyûgun* dan *Heiho* maupun pemuda membentuk barisan atau organisasi militer di tiap wilayah di Sumatera. Tujuan dibentuknya barisan atau organisasi tersebut adalah sebagai wadah perjuangan rakyat dan pusat informasi terkait kemerdekaan. "Penjaga Keamanan Rakyat" (PKR) adalah badan perjuangan bentukan para mantan *Giyûgun* dan *Heiho* maupun pemuda di Bengkulu di awal kemerdekaan.

Di Sumatera Selatan sendiri terbentuknya PKR karena terjadinya pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahan militer Jepang yang dipimpin Emir Mohammad Nur. Pada saat itu tidak hanya BKR tetapi juga dibentuk A.P.I (Angkatan Pemuda Indonesia). Pembentukan BKR di Lampung bertujuan untuk meredam pemberontakan yang ada di Lampung. Informasi mengenai pembentukan BKR di Lampung khususnya di Tanjung Karang tersebar ke setiap daerah yang ada di Lampung sehingga daerah-daerah yang mendapatkan informasi tersebut segera membentuk anggota BKR.

BKR adalah salah satu lembaga bela negara resmi. BKR merupakan suatu fenomena sejarah yang amat penting karena eksistensi BKR tampak nyata dan menjadi modal pertama bagi Bangsa Indonesia untuk mempertahankan serta membela negara yang baru saja di proklamirkan. Dalam tahap awal BKR sebagai lembaga bela

negara masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk suatu tentara kebangsaan, namun telah mampu menyelesaikan tugas sejarahnya sebagai cikal bakal TNI/ABRI.

Lahirnya BKR dicetuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden, dalam rapatnya pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan:

- a. Badan Keamanan Rakyat (BKR) memiliki tugas memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan- jawatan negeri yang bersangkutan
- b. BKR merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) didirikan di pusat sampai ke daerah-daerah.
- c. Pekerjaannya harus dilakukan dengan sukarela Pada tanggal 23 Agustus 1945 Bung Karno menegaskan "Kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera BKR di mana-mana, untuk membantu penjagaan keamanan. (Roeslan Abdulgani 1991:67).

Semula BKR dimaksudkan sebagai suatu bagian dari Badan Penolong Korban Perang. Aneh sekali kedengarannya, tetapi memang demikian kenyataannya. Dan tugas Badan penolong Korban Perang itu resminya berbunyi "menjalin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan pertolongan dan bantuan dengan memelihara keselamatan dan keamanan"

Perang Pasifik baru selesai. Tentara Jepang di seluruh Indonesia berjumlah 344.000 prajurit yang masih utuh, tetapi kalah perang, ditugaskan oleh Sekutu untuk menjaga keamanan sampai Sekutu datang. Organisasi-organisasi

pembelaan rakyat kita zaman Jepang seperti *PETA*, *Heiho*, *Kebodan*, *Seinandan*, dan sebagainya, mulai dibubarkan oleh Jepang Persenjataan mereka mulai dilucuti. Pemimpin-pemimpin kita menyadari bahwa proklamasi kita harus dibela, tidak hanya secara politis, tetapi juga secara militer. Pembentukan BKR merupakan sarana untuk menampung organisasi-organisasi pembelaan itu dalam wadah nasional. Pada awalnya BKR merupakan sebuah badan. Tetapi akan ditingkatkan ke arah ketentaraan.

Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) merupakan suatu badan keamanan serupa Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk resmi oleh pemerintah. Badan keamanan ini berada di bawah BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang), suatu badan yang didirikan untuk mengurus masalah sosial para mantan anggota organisasi kemiliteran Jepang.

Pembentukan BKR jang demikian adalah sebagai bagian dari BPKKP, dan badan ini adalah landjutan dari BPP (Badan Pembantu Pembelaan, pada mulanya Badan Pembantu Pradjurit) jang didirikan oleh pemerintah Balatentara Djepang untuk menolong urusan sosial bagi Peta. BPP ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata dari Djawa *Hoko Kai*, dan pada minggu jang pertama BKR ini dengan sendirinja berada di bawah pengawasan materi negara tersebut (A.H. Nasution, 1963:207).

Pada awalnya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Lampung masih merupakan sebuah Karesidenan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kementerian Dalam Negeri memutuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dibagi dalam delapan Provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi beberapa Karesidenan,

Kabupaten, Kotapraja, dan Kawedanan (Dewan Harian Daerah, 1994:10).

Selama periode perang kemerdekaan (1945-1949) banyak peraturan-peraturan pusat mengenai administrasi pemerintahan daerah yang tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Perkembangan administrasi pemerintahan selanjutnya menjadi Provinsi Sumatera dengan sepuluh Karesidenan yaitu: Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Tapanuli, karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Riau, Karesidenan Jambi, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung dan Karesidenan Bangka Belitung (Nugroho Sutanto, 1993:244).

Memasuki zaman kemerdekaan, dua hari setelah proklamasi PPKI menetapkan keputusan yaitu tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Setiap provinsi membawahi beberapa Karesidenan dan setiap Karesidenan dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten/ Kotapraja (Dewan Harian Daerah, 1994:105).

Daerah Lampung kemudian segera dijadikan daerah karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen Militer bernama Letnan Kol. Kurita (Dewan Harian Daerah, 1994:104). Dalam lembaga pemerintahan di bawah tingkat karesidenan, kepengurusannya diserahkan kepada orang Indonesia. Dalam tindakan ini Jepang tidak mengawasi secara langsung melainkan hanya bertindak sebagai pengawas saja.

Semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 maka terbukalah harapan bagi Bangsa Indonesia umumnya, bahwa dalam alam kemerdekaan bisa dilaksanakan pembangunan yang membawa peningkatan taraf hidup

disegala bidang. Setelah ada kabar dari Jakarta, khususnya PPKI memerintahkan kepada pemerintah kepemerintah daerah untuk mempersiapkan kemerdekaan yang seutuhnya. Pemerintah pusat menghimbau kepada daerah-daerah untuk melakukan perbuatan yang dapat memperkuat persatuan perjuangan dalam bidang pemerintahan dan kekuatan militer yang berguna untuk melawan serangan dari luar, seperti yang kita ketahui walaupun kita sudah merdeka gangguan masih saja datang yang dapat mengancam kemerdekaan Indonesia.

Dalam usaha pemindah kekuasaan dari tangan Jepang kepemerintah Indonesia, diadakan perundingan antara *suchokan*. Residen Jepang Khobayashi dengan Mr. Abbas (yang kemudian menjadi Residen pertama yang ditunjuk langsung dari pusat), dengan didampingi oleh St. Rahim Pasaman yang telah berjanji akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan Karesidenan Lampung secara damai, pengembalian kekuasaan pemerintahan Karesidenan kemudian disusul dengan pengembalian instansi- instansi lain.

Supangat, Dewan Harian Ang' 45 (1994:136) menjelaskan Instansi- instansi tersebut adalah :

- a) Kantor tilpun Tanjung Karang
- b) Kantor pos dan telegram
- c) Stasiun kereta api
- d) Perusahaan Gas dan Listrik
- e) Pelabuhan Panjang dan Gudang Agen
- f) Pabrik es
- g) Gedung peralatan Kaygun

Sebagai residen pertama Karesidenan Lampung Mr. Abbas dan wakilnya St. Rasim Pasaman, mempunyai tugas-tugas penting diantaranya: Pengambilan kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang ke tangan Pemerintah Republik Indonesia,

pembentukan organisasi perjuangan dikalangan pemuda bekas *Heiho*, *Giyugun* serta organisasi politik, usaha untuk mendapatkan senjata dengan jalan melucuti senjata Jepang, pembentukan PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) dibawah kepemimpinan Pangerah Emir Moh. Nur, yang anggotanya para mantan *Giyugun*, *Heiho*, *sjeneindan*, *Keibodan* dan tokoh- tokoh pemuda militan.

Di Lampung pada pertengahan bulan Desember 1945 para perwira *Giyugun* Lampung yang memimpin PKR, pelopor dan organisasi kelaskaran mengadakan musyawarah untuk membentuk Resimen III dengan komandan yang terpilih adalah Iwan Supardi, mendirikan sekolah latihan calon perwira di Langkapura. Pada bulan Februari 1946 tentara Jepang menduduki daerah Lampung telah selesai seluruhnya meninggalkan Lampung menuju Palembang.

Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Pada Saat Pembentukan PKR Tahun 1945

a. Kontribusi yang bersifat Non Materi

Pada buku 100 Tokoh Terkemuka Lampung pada halaman 60, terdapat catatan mengenai karier militer Alamsyah Ratu Perwiranegara yaitu setelah menjadi Letnan dua *Giyugun*, zaman pendudukan Jepang, 1943-1945, lalu menjadi wakil ketua BPKR (Badan Penjaga Keamanan Rakyat) Kotabumi pada tahun 1945 (Lampung Post, 2008;59).

Tidak hanya membentuk PKR tetapi menurut hasil wawancara bersama Saleh Achmad selaku orang yang mengaku pernah mengenal Alamsyah Ratu Perwiranegara, beliau mengatakan bahwa Alamsyah Ratu Perwiranegara juga turut serta dalam perekrutan pemuda-pemuda

Kotabumi untuk turut serta ikut dalam PKR.

Bapak Alamsyah juga merekrut Pemuda-pemuda Kotabumi untuk ikut bergabung dalam PKR Kotabumi. Para pemuda ini ada yang dari rakyat biasa ada juga yang dari mantan pelajar *Giyugun* dan *Heiho*. Setelah Pengrekrutan juga para pemuda ini diberikan pelatihan-pelatihan militer yang mana diantara mereka ada yang belum memiliki dasar kemiliteran (Saleh Achmad, PKR di Kotabumi. 13 Mei 2018).

Pendapat Saleh Achmad ini sejalan dengan sumber data yang ditulis oleh Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul *Giyugun* cikal bakal tentara nasional Sumatera menjelaskan pada halaman 126. “ Tugas pertama yang diemban oleh para pengurus BPKR pusat adalah melakukan kontak dengan teman-teman lama yang masih tinggal di dusun-dusun, dan menginstruksikan kepada mereka agar segera membentuk badan-badan serupa BPKR (Mestika Zed, 2005:126).

Pada saat itu PKR dibentuk untuk menyatukan masyarakat di Kotabumi khususnya karena sebelumnya banyak sekali organisasi militer bentukan Jepang. Maka dari itu PKR ini dijadikan sebagai wadah untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam suatu wadah untuk mencegah adanya konflik internal dan menyatukan tujuan yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi pemuda-pemuda di Kotabumi yang sebagian besar masih belum mengerti tentang kemiliteran maka di PKR ini.

b. Kontribusi Bersifat Materi Saat Pembentukan

Sebagai kekuatan bersenjata pertama dalam alam Indonesia merdeka, BKR sebenarnya kurang memadai untuk disejajarkan sebagai suatu

organisasi yang terkoordinasi dengan rapi. Barisan-barisan bersenjata yang berdiri spontan usai pengumuman proklamasi kemerdekaan itu pada prinsipnya bisa disejajarkan dengan kelompok-kelompok laskar yang didirikan agak kemudian (Mestika zed, 2005:119).

Tidak hanya di Sumatera Selatan ataupun Kotabumi, di Sumatera Barat dan Timur juga dibentuk suatu Badan bersenjata serupa PKR. Dari sumber yang akan penulis paparkan di bawah ini dapat dilihat bagaimana angkatan bersenjata di setiap daerah mengakomodir segala keperluannya.

Di Padang setiap Komandan BKR beserta ratusan anak buah adalah kelompok kekuatan yang memiliki otonomi sangat besar di lokasi masing-masing. Mereka mengeluarkan berbagai perintah dan menyelesaikan urusan sendiri-sendiri, baik dibidang pengorganisasian maupun logistik dan persenjataan. Mereka sangat mengandalkan bantuan yang diberikan oleh rakyat setempat. Pada tahap awal mereka adalah prajurit-prajurit tanpa tanda pangkat dan seragam. Persenjataan mereka hanya bambu runcing dan beberapa pucuk senjata rampasan dari Jepang (Amiruddin Jr., 1957:8)

Di Medan misalnya, tidak berapa lama setelah *Giyugun* di bubarkan, Selamat Ginting, Ahmad Tahir dan beberapa kawan berusaha menghubungi Xarim MS, tokoh yang merekrut mereka masuk *Giyugun* dan pengawas BOMPA. Semua milik dan peralatan bekas BOMPA diambil alih, termasuk gedung-gedung perkantoran yang pada zaman pendudukan Jepang dipakai sebagai tempat menyimpan beras dan bahan-bahan logistik *Giyugun*. Sejak itu BOMPA berganti nama menjadi Panitia Penolong Pengangguran Heiho dan *Giyugun* (Mestika Zed, 2005:120).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap daerah yang mendirikan badan kemiliteran serupa PKR menginstruksikan anggota dan masyarakat untuk saling membantu dalam memberikan kontribusi dalam hal materi untuk membentuk suatu badan kemiliteran. Hal ini karena kesadaran mereka bahwa setiap daerah juga harus siap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan Sekutu khususnya Belanda.

Pasca Pembentukan PKR Sumatera Selatan 1945

a. Kontribusi yang bersifat Non Materi

Pada masa ini dijelaskan juga bahwa pada buku H. Alamsyah Ratu Perwiranegara Tulisan Suparwan G. Parikesit bahwa, Saat itu semua bebas memilih pangkat Alamsyah memilih pangkat kapten, belakangan dilihatnya di daerah Palembang yang tadinya (di masa *Giyugun*) hanya berpangkat jun-i (pembantu letnan satu) ada yang memilih pangkat mayor, malahan ada yang letnan kolonel. Alamsyah tertawa dalam hati melihat kawan-kawan tersebut. Memang akhirnya setelah kemerdekaan sampai masa Orde Baru, semua mereka yang memilih pangkat yang berlebihan tersebut gagal di tengah jalan (Suparwan G. Parikesit, 1995:41).

Pada hasil wawancara bersama Bapak Saleh Achmad seorang ketua veteran daerah Kotabumi yang dulu pernah menempuh pendidikan militer Jepang di *Heiho* dan memiliki kedekatan dengan Alamsyah Ratu Perwiranegara menerangkan bahwa:

Setelah membentuk dan mengumpulkan pemuda-pemuda Lampung Utara untuk dijadikan anggota PKR, Bapak Alamsyah Ratu Perwiranegara juga memberikan pelatihan kepada para pemuda-pemuda tersebut mengenai taktik dan strategi

tempur seperti yang ia dapatkan saat menempuh pendidikan di *Gyu-gun*. Karena bapak Alamsyah Ratu Perwiranegara tahu bahwa pasukan sekutu seperti Belanda akan kembali datang untuk menyerang Indonesia (Saleh Achmad, PKR di Kotabumi. 13 Mei 2018).

Walaupun pendapat Saleh Achmad ini tidak terdapat dalam buku mengenai Alamsyah yang melatih pemuda-pemuda yang direkrutnya dalam PKR namun data mengenai kemampuan Alamsyah dalam melatih para prajurit tidak bisa di elakan lagi. Seperti dalam buku H. Alamsyah Ratu Perwiranegara yang ditulis oleh Suparwan G. Parikesit pada halaman 44, dan dalam buku untaian bunga rampai perjuangan di Lampung Buku III pada halaman 286, menjelaskan sebagai berikut :

karena keadaan terus berkembang Pimpinan PKR merasa perlu memberikan keterampilan dan pendidikan militer bagi anggota PKR. Mengingat banyak anggota PKR berasal dari masyarakat langsung, dan belum pernah mengenal pendidikan kemiliteran. Maka dari itulah diberikannya dasar kemiliteran terutama bagi pemuda yang belum berpengalaman dalam ilmu kemiliteran. Penunjukan Alamsyah Ratu Perwiranegara menjadi instruktur mungkin karena saat di *Giyugun* dahulu dianggap termasuk menonjol dalam banyak hal, khususnya dibidang yang bersifat instruktif, administratif, taktik dan strategi (Alamsyah Ratu Perwiranegara, 1987:44).

Sejak tahun 1946 Kapten Riyakudu menjadi pelatih di sekolah Kader Perwira di Pebem bersama Kapten Nefa dan Kapten Alamsyah. Sekolah calon perwira itu dipimpin oleh letkol Bambang Utoyo (Dewan Harian Daerah Lampung, 1994:286).

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa memang Alamsyah Ratu Perwiranegara memiliki kemampuan dalam hal melatih prajurit. Kemampuan dan pemikiran Kapten Alamsyah memang sangat berharga bagi perkembangan militer di Kotabumi pada saat itu. Melihat data akan kemampuan Alamsyah dalam melatih tersebut memang benar saat itu ada pelatihan yang diberikan kapten Alamsyah pada para pemuda PKR di Kotabumi. Hal tersebut diperkuat dengan sumber data yang menyebutkan bahwa PKR memang sempat mengadakan pelatihan kemiliteran bagi para pasukannya. Seperti dalam buku Untaian Bunga Rampai Perjuangan di Lampung buku III, memperlihatkan dalam halaman 65. "Dalam kegiatannya PKR laut selain secara teratur mengadakan latihan-latihan kemiliteran juga mengadakan Patroli laut (Dewan harian daerah, 1994:65).

Data di atas memaparkan bahwa Kapten Alamsyah ikut serta mengawal Emir M. Noor yang saat itu masih menjabat ketua PKR Tanjung Karang. Selain itu dari data di atas juga dapat dilihat bahwa Alamsyah Ratu Perwiranegara juga turut menghadiri rapat. Berarti jelas dari kedua data tersebut bahwa Alamsyah Ratu Perwiranegara berkontribusi penuh yang tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga berkontribusi dalam hal pemikiran.

b. Kontribusi dari Segi Materi Pasca Pembentukan PKR

Kontribusi dari segi materi pasca pembentukan PKR juga dirasa sama seperti saat pembentukan. Bersumber dari buku Mestika zed yang berjudul *Giyugun cikal bakal tentara nasional Sumatera*, yang mengutip dari tulisan Amirudin Jr. menjelaskan sebagai berikut:

Mereka kerap kali menggelar latihan baris-berbaris di berbagai kota dan pelosok kampung. Mereka tidak di asramakan, tetapi tinggal di rumah orangtua masing-masing. Untuk urusan logistic mereka meminta dari masyarakat. Hampir semua perlengkapan-lampu, tikar, makanan dan lain-lain disediakan oleh orang tua. Cikal bakal angkatan bersenjata Indonesia sebagai "anak rakyat" seharusnya dilihat dalam konteks dan masa itu (Mestika Zed, 2005:119).

Terlihat sekali bahwa setiap elemen saling memberikan kontribusi materi dengan sukarela untuk mengakomodasi keperluan PKR. Pada saat itu memang Indonesia sudah merdeka namun kondisi perekonomian dan politik Indonesia masih sangat lemah saat itu. Hal inilah yang membuat setiap masyarakat saling bahu-membahu untuk menjaga mempertahankan kemerdekaan pada saat itu.

Saat Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Abdul Haq bertugas mengawal Pangeran Emir M. Noor ke daerah Palembang untuk memeriksa perkembangan PKR di Baturaja dan Lahat sekaligus menghadiri rapat. Bersumber dari buku yang berjudul *untaian bunga rampai perjuangan di Lampung* dan H. Alamsyah Ratu Perwiranegara ditulis bahwa mereka berangkat ke Palembang menggunakan alat transportasi kereta dan dilanjutkan menaiki kapal melalui Sungai Musi .

Pada waktu berangkat ke Pagaralam dengan Kereta Api, Emir Moh. Nur telah mengenakan pakaian seragam dengan pangkat Mayor Jenderal, sedangkan Alamsyah dan Abdulhak yang ikut mengawal juga mengenakan pakaian seragam dengan pangkat Kapten. Peserta yang datang di Palembang juga mengenakan tanda pengenal berupa jantung berwarna

kuning hijau (Dewan Harian Daerah, 1994:26).

Sesudah pertemuan itu, kami rombongan pangeran Emir M. Noor, menuju Jambi untuk mengadakan inpeksi dan membicarakan hal-hal yang bersifat koordinasi. Dari Jambi, kami menuju Palembang. Rombongan terpaksa menunggu agak lama di surolangun Rawas, karena belum dapat masuk ke Lubuk Linggau yang pada saat itu sedang terjadi pertempuran dengan Jepang. Akhirnya rombongan Pangeran Emir M. Noor memutuskan untuk masuk dari Muara Rupit dengan kapal Roda Lambung melalui sungai Musi menuju ke Palembang (Suparwan G. Parikesit, 1995:41).

Dapat diketahui dari dua sumber di atas bahwa saat itu PKR menggunakan sarana transportasi umum untuk pergi ke Palembang, yang memungkinkan setiap anggota dapat berkontribusi materi berupa uang atau barang untuk keberangkatan dengan menggunakan sarana transportasi umum.

Pembahasan

Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Pada PKR di Kotabumi Tahun 1945

Berdasarkan data hasil penelitian di atas kita mengetahui kontribusi Alamsyah baik dari materi dan non materi. Kontribusi itu tidak luput dari semangat juang yang dimiliki seorang Alamsyah Ratu Perwiranegara. Peristiwa dan kisah heroiknya yang banyak ditulis orang, nama jalan yang sering menggunakan namanya dan Patung Pahlawan yang terukir namanya mengisyaratkan bahwa memang beliau adalah pahlawan asal Lampung yang patut dikenang jasa-jasanya. Eksistensi beliau di dunia militer dan perpolitikan nasional telah mengharumkan nama Lampung khususnya Kotabumi.

Data mengenai Kontribusi Alamsyah dari segi Materi dan non materi memang tidak begitu berimbang. Namun kontribusi non material beliau telah membuat PKR menjadi cikal bakal tentara nasional. Pemikiran dan upaya fisiknya mampu membangkitkan gairah pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari tangan sekutu khususnya Belanda. Penulis di sini membahas lebih lanjut mengenai kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara terhadap PKR di Kotabumi pada tahun 1945 yang berdasarkan pada data-data yang telah penulis pada deskripsi data sebelumnya.

Memelopori pembentukan PKR di Kotabumi bersama Kapten Riyakudu. Setelah Jepang kalah dan menyerah kepada Sekutu di tahun 1945. Pemerintah tentara Jepang membubarkan organisasi-organisasi militernya termasuk *Giyugun* yang berbasis di Palembang. Setelah *Giyugun* dibubarkan Alamsyah Ratu Perwiranegara kembali ke Lampung dan membentuk PKR di Lampung Utara seperti BKR yang sudah dibentuk oleh pangeran Emir M. Noor di Tanjung Karang. Bersama Kapten Riyakudu, Alamsyah Ratu Perwiranegara memelopori pembentukan PKR di Lampung Utara.

Alamsyah Ratu Perwiranegara menjadi wakil ketua dan memilih pangkat Kapten. Saat masa pembentukan PKR di Kotabumi Alamsyah Lebih Memilih menjadi wakil ketua karena Kapten Alamsyah menghormati sosok Kapten Ryacudu yang saat itu lebih tua darinya. Walau saat itu dia menjadi seorang wakil ketua namun kontribusinya di PKR Kotabumi sangat membantu dalam pengembangan cikal bakal tentara nasional Indonesia. Pada masa itu juga Alamsyah Ratu Perwiranegara hanya memilih Pangkat

Kapten, padahal saat itu semua orang bebas memilih pangkat yang mereka inginkan. Namun karena sifat Alamsyah yang rendah hati dan sadar diri inilah yang membuat Alamsyah tidak semena-mena dalam mengambil penghargaan untuk dirinya sendiri.

Mempersatukan para pemuda Kotabumi untuk ikut bergabung dalam PKR. Dalam pembentukan PKR juga dilakukan Pengrekrutan oleh para pimpinan PKR termasuk Alamsyah Ratu Perwiranegara yang menjadi Wakil Ketua PKR Kotabumi. Pengrekrutan ini dilakukan untuk menambah pasukan untuk memperluas keamanan di Kotabumi dan agar mampu menjadi wadah bagi para pemuda di Lampung Utara untuk menyalurkan Perjuangan mereka pada Badan Keamanan Rakyat ini selain itu untuk ikut serta ambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia pada saat itu. Pada masa setelah kemerdekaan ini banyak sekali para pelajar yang dulunya bersekolah di sekolah militer Jepang, tidak sedikit yang membentuk perkumpulannya sendiri. Maka dari itu PKR inilah menjadi salah satu wadah agar masyarakat Kotabumi pada saat itu menjadi satu visi dan satu tujuan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia dari tangan Asing.

Melatih pemuda-pemuda yang tergabung dalam PKR Kotabumi. Setelah Penjaga Keamanan Rakyat terbentuk Alamsyah melatih pemuda-pemuda Lampung dengan memberikan keterampilan dan pendidikan Militer. Mengingat bahwa banyak anggota yang dari masyarakat langsung, dan belum pernah mengenal pendidikan kemiliteran. Saat itu diberikan dasar kemiliteran seperti taktik penggunaan senjata, kepemimpinan serta latihan – latihan keprajuritan yang diperlukan bagi pemuda yang belum

berpengalaman dalam ilmu kemiliteran. Pelatihan yang diberikan Alamsyah ini sangat penting bagi masa depan pemuda Lampung agar dapat membantu dalam mempertahankan Kemerdekaan Negara Indonesia.

Alamsyah Ratu Perwiranegara bersama PKR juga ikut dalam penumpasan kerusuhan yang menamakan dirinya polisi rakyat. kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara pada kondisi ini adalah kontribusi yang bersifat non materi karena Alamsyah Ratu Perwiranegara memberikan strategi dalam menghentikan kerusuhan tersebut. walaupun kerusuhan tersebut dapat dihentikan namun kakak Alamsyah H. Adnan mengalami luka-luka pada insiden tersebut.

Diangkat menjadi sekertaris sekaligus ajudan oleh ketua PKR Tanjung Karang. Jabatan yang dipegang Kapten Alamsyah Ratu Perwiranegara selama berada di Penjaga Keamanan Rakyat Kotabumi adalah sebagai wakil Pimpinan. Lalu karena keterampilan dan kecerdasannya beliau membuat Ketua PKR Tanjung Karang Tertarik Untuk menariknya ke PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) Tanjung Karang. Kapten Alamsyah ditarik ketua PKR Lampung, Jenderal Mayor Pangeran Emir M. Noor dan diangkat menjadi sekretaris karena keterampilannya dibidang administrasi dan mampu berbahasa asing, dan kelak diangkat menjadi ajudan oleh Emir M. Noor di karenakan belum memiliki ajudan pada saat itu. Keterampilan Kapten Alamsyah memang sangat terasah berkat organisasi kemiliteran Jepang pada saat itu yakni *Giyugun*, yang membantunya berkembang dan menjadi populer saat itu. Keterampilan militer dan kecerdasan dari Kapten Alamsyah inilah yang membuat karirnya semakin meningkat hingga di era Orde baru.

Ikut memeriksa perkembangan PKR di Baturaja dan Lahat sekaligus menghadiri rapat mewakili daerah Lampung. Pada bulan Oktober 1945 Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Abdul Hag yang saat itu sama-sama sudah berpangkat kapten dengan pengawal lebih kurang satu peleton diajak Pangeran Emir M. Noor ke daerah Palembang untuk memeriksa perkembangan PKR di Baturaja dan Lahat sekaligus menghadiri rapat, atau lebih tepatnya pertemuan para tokoh bekas anggota *Giyugun* dan *Heiho* di Pagar Alam. Pertemuan dipagar Alam Berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 1945. Walaupun saat itu Pangeran Emir M. Noor yang memimpin pertemuan tersebut namun sosok Kapten Alamsyah juga berjasa dalam menjaga rombongan dalam perjalanan dan juga ikut serta menghadiri pertemuan tersebut. Tidak hanya pertemuan, namun rapat yang diadakan di Pagaralam saat itu di ikuti oleh 50 perwira termasuk Kapten Alamsyah Ratu Perwiranegara. Rapat itu juga menghasilkan susunan pimpinan tentara untuk Sumatera Selatan. Selain itu putusan lain adalah memantapkan bidang pertahanan dan keamanan di daerah, sekaligus sebagai response atas kedatangan Sekutu di Palembang.

Perjuangan dan kisah heroik Alamsyah memang kebanyakan ketika ia berada di Palembang, tetapi tidak menutup kemungkinan jika Alamsyah Ratu Perwiranegara juga ikut serta berjuang di tanah kelahirannya. Kontribusinya terhadap PKR adalah bukti bahwa Alamsyah memang pejuang asal Lampung yang patut di hormati. Patung symbol pahlawan yang didirikan di Kotabumi yang bertulis nama dan terukir wajahnya memang pantas dipajang di sana. Alamsyah Ratu Perwiranegara adalah sosok yang

dikenal mungil dengan segudang tanda jasa dan prestasi. Patutnya setiap pemuda-pemudi khususnya di Lampung menjadikannya contoh dan tauladan untuk mengharumkan nama negeri. Penulis berharap semoga muncul Alamsyah-Alamsyah lainnya yang mampu mengharumkan nama lampung di kancah nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi Alamsyah Ratu Prawiranegara dalam perkembangan Penjaga Keamanan Rakyat atau PKR di Kotabumi tahun 1945 lebih banyak terlihat pada segi non material. Kontribusi itu meliputi fisik dan pemikiran Alamsyah Ratu Perwiranegara curahkan untuk membentuk dan mengembangkan PKR menjadi wadah para eks *giyugun*, *heiho* dan seluruh pemuda di Kotabumi agar selalu siap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kontribusi alamsyah ini meliputi: Pada Masa pembentukan Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Alamsyah memelopori pembentukan PKR di Kotabumi, Alamsyah bersama Kapten Riyakudu membentuk Penjaga Kemanan Rakyat. Saat itu Alamsyah Ratu Perwiranegara memilih menjadi wakil ketua saat di PKR Kotabumi. Alamsyah Ratu Perwiranegara juga merekrut para pemuda untuk ikut bergabung dalam PKR di Kotabumi. Alamsyah juga melatih pemuda-pemuda yang tergabung dalam PKR Kotabumi. Pada masa itu di Kotabumi terjadi kerusuhan dan Alamsyah bersama dengan Penjaga Kemanan Rakyat ikut membantu dalam meredakan kerusuhan tersebut. Ikut memeriksa perkembangan PKR di Baturaja dan Lahat sekaligus menghadiri rapat mewakili daerah Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, R. 1991. *Resapkan dan Amalkan Pancasila*. Jakarta: BP Prapantja

Achmad, S. 2018. *PKR di Kotabumi*. Lampung: Kantor Veteran Kotabumi

Amiruddin. 1957. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution, A. H.. 1963. *Tentara Nasional Indonesia I*. Jakarta: GanacoN.V.

Notosusanto, N. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Parikesit, G. S. 1995. *H. Alamsyah Ratu Perwiranegara*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Perwiranegara, R. A. 1995. *PETA dan GYU GUN Cikal Bakal TNI*. Jakarta:YAPETA

Zed, M. 2005. *GIYÛGUN Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia